

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI DESA ANGGRA DISTRIK MINYAMBOU KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT

Septinus Wonggor¹, Sigit Wahyudi², Abdul Rahman³

^{1, 2, 3}Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma, Malang, Indonesia

Email: septinuswonggor@gmail.com

Article History

Received: 23-07-2024

Revision: 05-08-2024

Accepted: 09-08-2024

Published: 12-08-2024

Abstract. This research aims to determine the role of the village head in increasing community empowerment in the economic sector in Anggra Village, Minyambou District, Arfak Mountains Regency. The data collection method in this research is descriptive qualitative, where this research was carried out by observation, interviews, and documentation. The data used in this research are primary data and secondary data with the research subjects consisting of the Village Head, BPD, and Community Figures. The research results show that the Village Head in carrying out his role is quite good, this can be seen from the results of improving the community's economy and his role in motivating, facilitating, carrying out his duties, and mobilizing residents in every activity to support success in improving the community's economy. These activities took the form of road construction, bridge construction, field schools, greading and counseling, which were carried out in Anggra Village, Minyambou District, Arfak Mountains Regency, West Papua Province

Keywords: Optimization, Public Empowerment, Empowerment, Community

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi di Desa Anggra Distrik Minyambou Kabupaten Pegunungan Arfak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian terdiri dari Kepala Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan perannya sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil peningkatan ekonomi masyarakat dan perannya dalam memotivasi, memfasilitasi, melaksanakan tugasnya, dan menggerakkan warga dalam disetiap kegiatan-kegiatan untuk menunjang keberhasilan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut berupa pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sekolah lapangan, greading, dan penyuluhan, yang di lakukan di Desa Anggra Distrik Minyambou Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat

Kata Kunci: Optimalisasi, Pelayanan Publik, Pemberdayaan, Masyarakat

How to Cite: Wonggor, S., Wahyudi, S., & Rahman, A. (2024). Optimalisasi Pelayanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Anggra Distrik Minyambou Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (4), 1446-1454. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1588>

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat dan Desa selalu berkaitan dengan berbagai problematikanya antara lain: kemiskinan, akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketimpangan sosial, kelembagaan yang belum berjalan efektif, dan kemandirian masyarakat desa merupakan

deskripsi atas persoalan masyarakat di tingkat pedesaan (Wahyudi et al., 2023). Pada satu sisi masyarakat pedesaan memiliki kekuatan modal sosial berupa tata kehidupan dengan basis gotong royong yang kuat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat desa seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah tahun 2000 merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Irwansyah et al., 2023)

Otonomi daerah meniscayakan desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasar prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya (Mardiasmo, 2004). Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000, kebijakan desentralisasi diikuti desentralisasi fiskal, dan anggarannya pun terus meningkat signifikan (Indiati et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan otonomi desa dengan manajemen pemberdayaan dan penguatan masyarakat dan desa melalui peningkatan peran modal sosial dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak sudah seharusnya dilakukan. Dengan begitu diharapkan terjadi penguatan ekonomi masyarakat pedesaan yang berdampak pada kemandirian masyarakat desa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Shardlow (1998) sebagai mana dikutip oleh Adi bahwa pengertian pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Hardiansyah, 2011). Berdasarkan pendapat para ahli di atas pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka membangun dan mengembangkan semua potensi yang ada di masyarakat agar masyarakat benar-benar berdaya baik secara individu, kelompok maupun komunitas lainnya sehingga bisa berkontribusi secara aktual demi menuju kemandirian masyarakat dan desa sesuai yang diharapkan (Waliulu, 2024).

Kabupaten Pegunungan Arfak dimana mayoritas wilayah dan kultur pedesaan menempatkan pemberdayaan masyarakat desa menjadi sangat strategis. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan kemandirian masyarakat pedesaan adalah kemajuan bagi Kabupaten Pegunungan Arfak. Demikian sebaliknya kegagalan membangun masyarakat baik secara fisik dan mental di wilayah pedesaan merupakan kegagalan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Luas wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak adalah 7.662,92 km². Terdiri dari, 37 Distrik/Distrik, dan 87 desa. Sedangkan Jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Arfak pada Tahun 2019 berdasarkan proyeksi BPS Papua Barat sebanyak 35.670 juta jiwa dengan komposisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 56 % juta jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 44% juta jiwa dengan mayoritas

berada di wilayah perdesaan. Dilihat dari aspek kesejahteraan yang tercermin dari banyaknya penduduk miskin menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan masyarakat desa di Kabupaten Pegunungan Arfak, dimana jumlah penduduk miskin Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2019 belum diketahui. Kondisi tersebut jauh dari ideal, apalagi Kabupaten Pegunungan Arfak menduduki peringkat pertama tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Papua Barat berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019. Dari 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, persentase pengangguran di Pegunungan Arfak sebesar 8,11 persen, nomor satu di Provinsi Papua Barat atau berada di peringkat tertinggi.

Kondisi demikian maka pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam kajian ilmiah ataupun penelitian, Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh dan dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang akan bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam status kelompok manusia, suatu objek dan suatu pemikiran serta peristiwa pada masa datang (Nazir, 2005).

Fokus penelitian ini adalah optimalisasi pelayanan publik tentang pemberdayaan masyarakat dan Desa di Desa Anggra Distrik Minyambou Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi Pelayanan Publik. Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya suatu penelitian guna memperoleh data serta informasi dari seorang informan. Peneliti juga diharapkan agar dapat mengungkapkan keadaan-keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi serta kegiatan-kegiatan di dalamnya. Dalam hal ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah PT. Surya Sawit

Sejati di Desa Anggra Distrik Minyambou Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Kesejahteraan desa tercipta melalui pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat pedesaan di bidang perekonomian yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga (Farhanuddin et al., 2023). Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa itu sendiri. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan suatu desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpinnya. Terlepas dari itu di Desa Anggra peran kepala desa sangat dibutuhkan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang ekonomi (Batubara et al., 2023).

Peran Kepala Desa sebagai Motivator

Pentingnya peranan motivator dalam proses meningkatkan ekonomi masyarakat dan perlu dipahami oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa di Desa Anggra agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat desa setempat. Kepala Desa sebagai motivator harus mampu memotivasi warga agar dapat meningkatkan ekonominya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, serta apa yang menjadi keinginan Kepala Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakatnya tercapai dengan baik tanpa adanya masalah, sebagai Kepala Desa harus mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat supaya masyarakat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga nantinya mencapai tujuan tertentu guna memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat (Hardiansyah, 2011).

Sebagai kepala pemerintah desa dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat bersama-sama dalam meningkatkan ekonomi dan memajukan desa dengan cara memberikan dorongan-dorongan kepada warga, disini dapat dilihat bahwa dorongan dari Kepala Desa selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada

masyarakat desa Desa Anggra akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses peningkatan ekonomi. Selain itu, dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Anggra karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat di perlukan dan dinantikan oleh masyarakat desa (Indiati et al., 2021).

Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator

Fasilitator dari Kepala Desa yang berarti Kepala Desa menjadi mediasi terhadap masalah yang dialami masyarakat mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk menunjang keberhasilan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat harus dipenuhi. Kepala Desa Sebagai fasilitator desa merupakan pendamping masyarakat dalam meningkatkan ekonominya, artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi termasuk pendukungnya (Indiati, 2022).

Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator cukup membantu masyarakat Desa Anggra, hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjadi Kepala Desa, salah satu contoh dilakukannya perbaikan jalan usaha tani dimana jalan ini adalah jalan akses untuk keladang milik warga, perbaikan jembatan, dan lainnya serta disamping itu banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan berupa pemberian bantuan atau memfasilitasi warga, serta kegiatan pelatihan untuk membuat masyarakat lebih kreatif.

Peran Kepala Desa sebagai Eksekutor

Sebagai pemimpin desa yang baik Kepala Desa tidak hanya menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di desa melainkan untuk bagaimana Kepala Desa juga ikut terlibat dari setiap kegiatan masyarakat. Berdasarkan apa yang diungkap diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa peran Kepala Desa sebagai eksekutor di Desa Anggra adalah keterlibatannya dalam pelaksanaan program-program masyarakat sangat aktif sehingga mampu mewujudkan kesadaran partisipasi masyarakat.

Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator

Kepala desa sebagai mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan guna untuk kepentingan bersama. kepala desa yang mengajak atau menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa (Moenir, 2002). Hal ini sama dengan Kepala Desa Anggra dalam menggerakkan warganya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa sudah dilakukan dengan baik (Tjiptono, 2005). Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Yang Mempengaruhi Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi di Desa Anggra Distrik Minyambou Kabupaten Pegunungan Arfak.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu yang menyebabkan timbulnya perubahan pada masyarakat itu sendiri baik secara individu, kelompok ataupun organisasi. Seperti halnya kepala desa Anggra dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi terdapat berbagai macam faktor pendukung, adalah sebagai berikut:

- Kekuasaan; hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam, karena tanpa kekuasaan maka kepala desa tidak memiliki kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikannya wewenang guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.
- Solidaritas aparatur desa; adanya solidaritas dari aparatur desa dalam membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ekonomi membuat kepala desa semakin semangat untuk mengawal keberhasilan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, salah satu inilah faktor pendukung yang memberikan kelancaran terhadap kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.
- Adanya kemitraan dengan lembaga-lembaga lain; untuk meningkatkan kreatifitas petani dan para pemuda, kepala desa menjalin kemitraan dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian Kabupaten Pegunungan Arfak agar para petani dan para pemuda di desa Anggra dapat mandiri dan terampil dalam memajukan desa dan ikut andil dalam bagian pemberdayaan terhadap desa. Sehingga diharapkan petani di desa Anggra menjadi petani yang mandiri, berdaulat, maju dan dapat bersaing dengan petani lain di luar kota dan pemuda dapat memiliki keterampilan dan penghasilan serta bisa hidup mandiri mengangkat perekonomian desa, agar desa tidak tertinggal jauh oleh perkotaan dan para pemuda terhindar dari pergaulan bebas yang dapat merugikan desa sendiri.
- Komitmen masyarakat; kepala desa dalam rangka memaksimalkan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak bisa dilakukan dengan sendiri melainkan atas bantuan dari masyarakat, masyarakat Desa Anggra miliki keinginan untuk merubah taraf hidupnya menjadi lebih baik khususnya di sektor ekonomi, maka dari itu segala upaya yang dilakukan masyarakat disana tergolong aktif, salah satu contoh ketika desa mengadakan penyuluhan yang berkaitan dengan ekonomi, disana masyarakat berbondong-bondong mengikuti acara tersebut (Yunus et al., 2023). Dari komitmen masyarakat ini dapat

membantu meringankan peran kepala desa sekaligus menjadi faktor pendukung kepala desa dalam melakukan perannya di Desa Anggra.

Faktor Penghambat

Secara umum tidak semua hal yang dilakukan manusia berjalan dengan mulus atau dikatakan dengan sempurna karena manusia pada umumnya memiliki keterbatasan, begitu pula yang dilakukan oleh Kepala Desa Anggra dalam melaksanakan perannya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomian masyarakat ada berbagai hal yang menjadi penghambat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat; kondisi yang dimaksud ialah mengenai SDM masyarakat yang masih minim, ketika adanya program yang dilakukan oleh pemerintah desa masyarakat sulit untuk memahami atau mencerna sehingga apa yang sudah diperoleh dari kegiatan tersebut tidak dapat diterapkan secara optimal.
- Sumber dana; dalam perencanaan program untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama memerlukan anggaran yang tidak sedikit meski itu tergantung keperluan yang dibutuhkan, begitupun yang dialami kepala desa Anggra beberapa program yang sudah direncanakan masih belum terlaksana karena permasalahanj anggra tersebut berakar dari anggaran yang masih belum cukup (Sedarmayanti, 2007)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yan telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Kepala Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa di Desa Anggra sudah berjalan dengan baik, Kepala Desa selaku pemerintah desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Kepala Desa dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan atau program ekonomi masyarakat desa yang sudah berjalan hingga saat ini. Dan kepala Desa harus mampu melaksanakan dan siap dengan masukan-masukan dari aspirasi masyarakat yang ada di desa Anggra, agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berjalan sesuai rencana.

REFERENSI

- Agung, Kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. hal. 78. UGM Press. Yogyakarta.
- Ahmar, A., & Rahman, A. (2017). Development of teaching material using an Android. *Global Journal of Engineering Education*, 19(1).

- Balai Pustaka. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta.
- Bappenas. 2007. *Modul Penerapan Prinsip – Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik*. Bappenas, Jakarta.
- Batinggi, Ahmad 1999. *Manajerial Pelayanan Umum*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya. Bandung.
- Cahyana, A., Pratama, J. A., Ramadhan, M. A., Totalia, S. A., & Wahyudi, S. (2024). Automation Model Development for School Reaccreditation of Early Childhood Education. *International Journal of Instruction*, 17(1), 193-214.
- Farhanuddin, F., Mardiyono, M., & Budiard, B. (2023). Inovasi Administrasi Publik dalam Menyokong Pengembangan Kurikulum Pesantren di Era Digital: Studi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Arif NW Teko. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 2073-2080.
- Hade Chandra Batubara, S. E., Agustina, E. S., Sos, S., MM, C., Rosita, S. E., Nuryakin, R. A., ... & SE, M. (2024). PEMAHAMAN BISNIS PROSES DAN PENGEMBANGANNYA. Cendikia Mulia Mandiri.
- Hardiansyah . 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Ibrahim. (1997). *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafie, dkk (1999). *Ilmu administrasi publik*. PT. Rikana citra, jakarta
- Indiati, I., Pattiran, M., & Wahyudi, S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Tani Nelayan dan Peternak (Studi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 340-354.
- Indiati, I., Wahyudi, S., & Vanchapo, A. R. (2024). Nurse Leadership Style in Indonesia Hospitals: A Literature Review. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 393-405.
- Indiati, I., & Aisyam, A. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Di SMA Negeri 1 Praya Lombok Tengah. *JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*, 8(1), 1-10.
- Indiati, I., Suljatmiko, S., Hoerudin, C. W., Afrilia, U. A., & Ratih, S. W. W. (2023). Optimization of E-Government Through Information Technology Management. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(3), 374-383.
- Indiati, I. (2022). Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muquoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 6(2), 508-514.
- Irwansyah, M., Supriyono, B., Sujarwoto, S., & Mardiyono, M. (2023, July). Economic Development and Welfare After Regional Proliferation in Indonesia. In *International Conference of Public Administration and Governance (ICOPAG 2022)* (pp. 205-213). Atlantis Press.
- Lembaga Administrasi Negara RI,(2007). *Penerapan Good Governance di Indonesia*. LAN. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Moenir, 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Moenir. 2002. *Maanajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2007. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Penerbit Mandar Maju. Bandung.

- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suhartawan, B., MT, M., Nurmaningtyas, A. R., Deni, H. A., MM, C., Santje Magdalena Iriyanto, M. T., ... & Barsei, A. N. (2024). Metodologi Penelitian. Cendikia Mulia Mandiri.
- Syafri, M., Marsidi, M., & Vanchapo, A. R. (2023). Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Disiplin Kerja Pada Kantor Pemerintahan Kota Pagar Alam. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(1), 58-75.
- Tjiptono. 2004:42 *strategi pemasaran*. edisi kedua. Andi. yogyakarta.
- Tjiptono. 2005. *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Distrik merupakan perangkat Daerah Kabupaten atau Kota di Papua yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik.
- Wahyudi, S., Mahsuni, A. W., & Khannanah, S. F. (2023). Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Usaha Rumahan (Studi pada Aktifitas Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Wisata Dewi Sri Di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)*, 8(1), 61-66.
- Waliulu, Y. S., Sos, S., Kom, M. I., Indah Naryanti, S. K. M., Seneru, W., Titi Nugraheni, S. E., ... & MKes, M. (2024). Pengantar Ilmu Komunikasi. Cendikia Mulia Mandiri.
- Yunus, Y., Gani, J. A., Mardiyono, M., & Saleh, C. (2023). Effectiveness of Village Government Apparatus Performance in Village Fund Management (A Study in Sirenja District, Donggala Regency). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 26(3).